

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Pengendalian Internal

Gebby Berlian Laoli¹, Aloysius Harry Mukti^{2*}

¹ Program Studi Akuntansi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat Kode Pos 17121; email: gebby.berlian17@mhs.ubharajaya.ac.id

² Program Studi Akuntansi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; Jalan Raya Perjuangan, Bekasi Utara, Jawa Barat Kode Pos 17121; email: aloysius.harry@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: aloysius.harry@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima: 01 Juli 2022; Review: 14 November 2022; Disetujui: 23 Desember 2022

Cara sitasi: Laoli GB, Mukti, AH. 2022. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Pemoderasi Pengendalian Internal. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 7 (2): 171-185.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Kota Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan pendekatan penelitian kausal. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pada BPKAD di Kota Bekasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bekasi, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) melalui *software* SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja kualitas laporan keuangan; (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan; (3) Sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh positif penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan; (4) Sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi tidak dapat memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal.

Abstract: This study aims to determine the effect of The Implementation of Government Accounting Standards and The Utilization of Information Technology on the Quality Of Financial Reports with an Internal Control System as a moderating variable BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) in Bekasi City. This research is quantitative research. With a causal research approach. Primary data collection was carried out by distributing questionnaires to all employees at the BPKAD in Bekasi City. Data analysis was performed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) model through SmartPLS 3.0 software. The results of the study show that (1) The Implementation of Government Accounting Standards has a positive effect on the Quality Performance of Financial Statements; (2) Utilization of Information Technology has a positive effect on the Quality of Financial Reports; (3) Internal Control System as a moderating variable does not have an influence on the relationship between the Implementation of Government Accounting Standards and the Quality of Financial Reports; (4) Internal Control System as a moderating variable has no influence on the relationship between Information Technology Utilization and Financial Report Quality

Keywords: Implementation of Government Accounting Standards, Utilization of Information Technology, Quality of Financial Reports, Internal Control System.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah diberlakukan sebagai bentuk perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan dalam pemerintahan daerah daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya setiap otonomi daerah dalam suatu daerah maka pengelolaan keuangan dalam pemerintahan daerah tersebut sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel yang berguna untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka adalah yang berperan dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah (Ikriyati & Aprila, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan bahwa suatu prasyarat normatif untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang berkarakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Fauziyah, 2019). Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang sangat benar dan jujur yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Mahayani et al., 2017). Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh adanya ketersediaan kelengkapan laporan keuangan tersebut yaitu: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dimana yang penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

UU Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga standar akuntansi pemerintah ini merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Rahmawati et al., 2018). SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Putri et al., 2016).

Faktor lain untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas adalah pengaruh akan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan pemerintah dan daerah (Nadir & Hasyim, 2017). Dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur tentang kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi salah satu komponen yang mempengaruhi suatu organisasi pemerintah yang paling kompleks terutama bagi para pengambil keputusan dalam organisasi, guna mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif (Rahmawati et al., 2018). Penerapan pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan efisien serta menjamin keterbentukan kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selain wajibnya pemanfaatan informasi teknologi, perlu adanya dukungan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menyebutkan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu terkait dengan catatan keuangan dengan memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah (Hardyansyah, 2017).

Proses pengelolaan keuangan daerah dalam suatu instansi pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan suatu pengelolaan keuangan yang efektif dan berkualitas baik. Dalam pengelolaan keuangan tersebut, yang akan nampak dari hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Pemerintah Kota Bekasi diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 27B/SHP/XVIII.BDG/05/2019, BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018 “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Hal ini artinya Pemerintah Kota Bekasi berhasil mempertahankan predikat opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya sehingga target berhasil dicapai dengan capaian 100%. Adapun BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun 2019, antara lain:

- a. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai
- b. Penambahan Anggaran serta Realisasi Belanja Langsung Urusan dan Belanja Langsung Penunjang Urusan Tahun 2018 pada Pemerintah Kota Bekasi tidak didasarkan pada 38 Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan SAP pentingnya adanya sistem pengendalian internal yang mempengaruhi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan efisien. Pentingnya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, kurangnya pengoptimalan faktor-faktor akan kualitas laporan keuangan tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan variabel pemoderasi sistem pengendalian internal dilakukan oleh Penelitian Astika *et al.*, (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh Penelitian Ni Putu *et al.* (2017) menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel moderasi dalam penelitian ini digunakan berdasarkan penelitian terdahulu Penelitian Galuh Dahana (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian serupa dilakukan oleh Hardyansyah (2016) yang

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memperkuat pengaruh penerapan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sepanjang keterbatasan pengetahuan peneliti, maka belum ada yang menguji secara bersamaan dengan variabel pemoderasi sistem pengendalian internal dalam konteks BPKAD Kota Bekasi.

Hipotesis

H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

H3 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi positif pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H4 : Sistem Pengendalian Internal memoderasi positif pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Metode Penelitian

Operasional Variabel

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Hardyansyah (2016) yang terdiri dari sembilan pertanyaan menggunakan skala likert 1-6.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 mendefinisikan standar akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Untuk mengukur penerapan standar akuntansi pemerintah, digunakan instrumen daftar pertanyaan Pujanira & Taman (2017) yang terdiri dari dua belas pertanyaan menggunakan skala likert 1-6.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai pilihan individu untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya (Thompson et al., 1991 dalam Rachmawati et al., 2018). Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Hardyansyah (2016) yang terdiri dari enam pertanyaan menggunakan skala likert 1-6

Sistem Pengendalian Internal (Z)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur kualitas laporan keuangan, digunakan instrumen daftar pertanyaan Hardyansyah (2016) yang terdiri dari sembilan pertanyaan menggunakan skala likert 1-6.

Sumber Data, Populasi dan Sampel

Tempat penelitian ini dilakukan pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bekasi pada bulan Juni 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bekasi. Beberapa kriteria sampel yaitu : (a). Pegawai keuangan di BPKAD Kota Bekasi (2). Bekerja lebih dari 1 tahun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden.

Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah *structural equation modelling* (SEM), yaitu memeriksa struktur keterkaitan yang dinyatakan dalam serangkaian persamaan. Persamaan-persamaan tersebut menggambarkan seluruh hubungan antara konstruk (variabel independen dan variabel dependen) yang terlibat dalam analisis (Hair *et al.*, 2013). Dalam penelitian ini, metode SEM yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS). Model evaluasi PLS didasarkan pada pengukuran prediksi yang memiliki sifat non-parametrik dengan merujuk pada:

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

$$x = \Pi x \xi + \varepsilon x$$

$$y = \Pi y \eta + \varepsilon y$$

Keterangan:

- x : matriks variabel manifest dengan konstruk laten eksogen ξ
- y : matriks variabel manifest dengan konstruk laten endogen η
- Πx dan Πy : matriks koefisien (*matrix loading*)
- εx dan εy : matriks *outer model residual*

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

$$\eta = \eta \beta + \xi \Gamma + \zeta$$

Keterangan:

- η : matriks konstruk laten endogen
- ξ : matriks konstruk laten eksogen
- β : koefisien matriks variabel endogen
- Γ : koefisien matriks variabel eksogen
- ζ : *inner model residual matrix*

Menjelaskan kronologis penelitian, termasuk desain penelitian, prosedur penelitian (dalam bentuk algoritma, Pseudocode atau lainnya), bagaimana untuk menguji dan akuisisi data. Deskripsi dari program penelitian harus didukung referensi, sehingga penjelasan tersebut dapat diterima secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Model Pengukuran (*Outer Model*)

Dari jumlah kuesioner yang dapat diolah, yaitu sebanyak 120 responden dalam penelitian ini. Nilai *convergen validity* adalah nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator-indikatornya.

- 1) Convergent Validity

Berdasarkan hasil *Outer Loading Factor* BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bekasi diatas, tidak terdapat indikator yang memiliki nilai *Loading Factor* yang kurang dari 0,7

2) Composite Reliability

Secara umum nilai *composite reliability* yang dapat digunakan minimal 0,6 atau lebih dengan skor *cronbachs alpha* diatas 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrument ini reliabel secara statistik

3.2 Statistik Deskriptif

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Analisis deskriptif terhadap variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari 12 item pernyataan dengan menggunakan 6 skala likert, dengan skala 1 yaitu sangat tidak setuju sekali dan 6 sangat setuju sekali. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Deskriptif Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase						Mean
	Sangat Tidak Setuju Sekali	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali	
	1	2	3	4	5	6	
PSAP 1	0	0	0	50	46	24	4,78
	0%	0%	0%	42%	38%	20%	
PSAP 2	0	0	0	77	23	20	4,53
	0%	0%	0%	64%	19%	17%	
PSAP 3	0	0	0	67	29	24	4,64
	0%	0%	0%	56%	24%	20%	
PSAP 4	0	0	1	66	29	24	4,63
	0%	0%	1%	55%	24%	20%	
PSAP 5	0	0	0	78	21	21	4,53
	0%	0%	0%	65%	18%	18%	
PSAP 6	0	0	0	82	23	15	4,44
	0%	0%	0%	68%	19%	13%	
PSAP 7	0	0	5	76	19	20	4,45
	0%	0%	4%	63%	16%	17%	
PSAP 8	0	0	0	77	25	18	4,51
	0%	0%	0%	64%	21%	15%	
PSAP 9	0	0	0	77	25	18	4,51
	0%	0%	0%	64%	21%	15%	
PSAP 10	0	0	7	67	25	21	4,50
	0%	0%	6%	56%	21%	18%	
PSAP 11	0	0	0	52	45	23	4,76
	0%	0%	0%	43%	38%	19%	
PSAP 12	0	0	0	76	26	18	4,52
	0%	0%	0%	63%	22%	15%	
Rata-Rata Skor Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)							4,57

Sumber: Data primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara umum persepsi responden terhadap item pernyataan pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) berada pada daerah tinggi dengan nilai rata-rata 4,57. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung dengan persepsi yang sangat setuju terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,78 berada pada item pernyataan pertama dengan pernyataan instansi menerapkan basis akrual untuk mengakui aset dan kewajiban. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai terendah yaitu terdapat pada item pernyataan keenam dengan indeks sebesar 4,44 dengan pernyataan instansi mengakui kas yang dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Analisis deskriptif terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 6 item pernyataan dengan menggunakan 6 skala likert, dengan skala 1 yaitu sangat tidak setuju sekali dan 6 sangat setuju sekali. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2
Dekriptif Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase						Mean
	Sangat Tidak Setuju Sekali	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali	
	1	2	3	4	5	6	
PTI 1	0	0	0	55	40	25	4,75
	0%	0%	0%	46%	33%	21%	
PTI 2	0	0	0	56	39	25	4,74
	0%	0%	0%	47%	33%	21%	
PTI 3	0	0	5	60	32	23	4,61
	0%	0%	4%	50%	27%	19%	
PTI 4	0	0	2	51	52	15	4,67
	0%	0%	2%	43%	43%	13%	
PTI 5	0	0	2	72	29	17	4,51
	0%	0%	2%	60%	24%	14%	
PTI 6	0	0	1	60	42	17	4,63
	0%	0%	1%	50%	35%	14%	
Rata-Rata Skor Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)							4,65

Sumber: Data primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa secara umum persepsi responden terhadap item pernyataan pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) berada pada daerah tinggi dengan nilai rata-rata 4,65. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung dengan persepsi yang sangat setuju terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. Terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,75 berada pada item pernyataan pertama dengan pernyataan sub bagian keuangan/akuntansi memiliki

komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai terendah yaitu terdapat pada item pernyataan kelima dengan indeks sebesar 4,51 dengan pernyataan laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.

Kualitas Laporan Keuangan

Analisis deskriptif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan terdiri dari 9 item pernyataan dengan menggunakan 6 skala likert, dengan skala 1 yaitu sangat tidak setuju sekali dan 6 sangat setuju sekali. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3
Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase						Mean
	Sangat Tidak Setuju Sekali	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali	
	1	2	3	4	5	6	
KLK 1	0	0	0	73	24	26	4,58
	0%	0%	0%	61%	20%	22%	
KLK 2	0	0	2	82	20	16	4,42
	0%	0%	2%	68%	17%	13%	
KLK 3	0	0	0	49	55	16	4,73
	0%	0%	0%	41%	46%	13%	
KLK 4	0	0	2	58	47	13	4,59
	0%	0%	2%	48%	39%	11%	
KLK 5	0	0	1	59	48	12	4,59
	0%	0%	1%	49%	40%	10%	
KLK 6	0	0	0	49	48	23	4,78
	0%	0%	0%	41%	40%	19%	
KLK 7	0	0	1	73	26	20	4,54
	0%	0%	1%	61%	22%	17%	
KLK 8	0	0	0	51	54	15	4,70
	0%	0%	0%	43%	45%	13%	
KLK 9	0	0	1	67	26	26	4,64
	0%	0%	1%	56%	22%	22%	
Rata-Rata Skor Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)							4,62

Sumber: Data primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa secara umum persepsi responden terhadap item pernyataan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) berada pada daerah tinggi dengan nilai rata-rata 4,62. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung dengan persepsi yang sangat setuju terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,78 berada pada item pernyataan keenam dengan pernyataan informasi dalam laporan keuangan dapat diuji, dan

apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan menunjukkan simpulan yang sama. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai terendah yaitu terdapat pada item pernyataan kedua dengan indeks sebesar 4,42 dengan pernyataan laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang

Sistem Pengendalian Internal

Analisis deskriptif terhadap variabel Budaya Organisasi terdiri dari 9 item pernyataan dengan menggunakan 6 skala likert, dengan skala 1 yaitu sangat tidak setuju sekali dan 6 sangat setuju sekali. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4
Deskriptif Variabel Sistem Pengendalian Internal

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase						Mean
	Sangat Tidak Setuju Sekali	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali	
	1	2	3	4	5	6	
SPI 1	0	0	2	81	17	20	4,46
	0%	0%	2%	68%	14%	17%	
SPI 2	0	0	9	82	25	4	4,20
	0%	0%	8%	68%	21%	3%	
SPI 3	0	0	7	77	25	11	4,33
	0%	0%	6%	64%	21%	9%	
SPI 4	0	0	1	48	55	16	4,72
	0%	0%	1%	40%	46%	13%	
SPI 5	0	0	1	73	27	19	4,53
	0%	0%	1%	61%	23%	16%	
SPI 6	0	0	1	73	28	18	4,53
	0%	0%	1%	61%	23%	15%	
SPI 7	0	0	2	69	32	17	4,53
	0%	0%	2%	58%	27%	14%	
SPI 8	0	0	0	50	52	18	4,73
	0%	0%	0%	42%	43%	15%	
SPI 9	0	0	2	46	49	23	4,78
	0%	0%	2%	38%	41%	19%	
Rata-Rata Skor Variabel Sistem Pengendalian Internal (M)							4,53

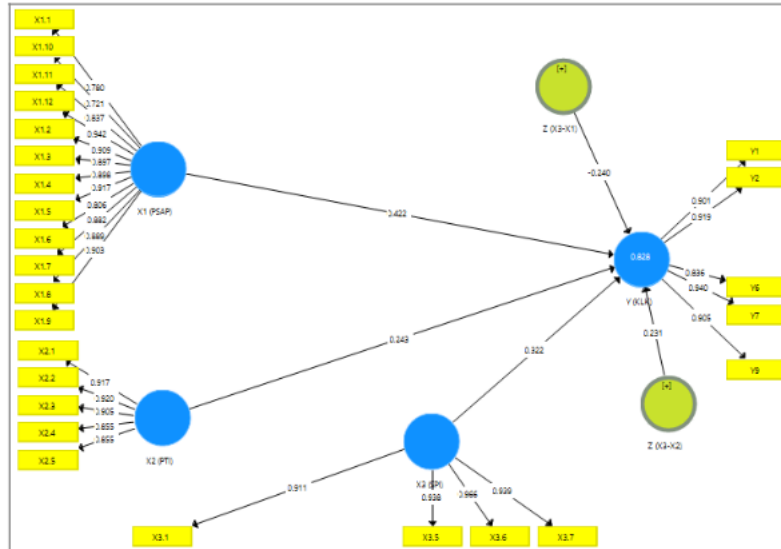
Sumber: Data primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa secara umum persepsi responden terhadap item pernyataan pada variabel Sistem Pengendalian Internal (M) berada pada daerah tinggi dengan nilai rata-rata 4,53. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung dengan persepsi yang sangat setuju terhadap Sistem Pengendalian Internal. Terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,78 berada pada item pernyataan kesembilan dengan pernyataan dalam pengelolaan keuangan organisasi dilakukan evaluasi oleh inspektorat dan BPK. Sementara untuk persepsi responden dengan nilai

terendah yaitu terdapat pada item pernyataan kedua dengan indeks sebesar 4,20 dengan pernyataan organisasi telah melakukan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi dan menempatkan pegawai sesuai dengan bidangnya.

Hasil Pengujian Model Pengukuran (Inner Model)

Pengujian *inner model* dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural di evaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.



Gambar 1. Model Pengukuran

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 1 merupakan hasil estimasi *R-square* dengan menggunakan smartPLS *Professional Editions*.

Tabel 5 Nilai *R-Square* (masuk)

Variabel	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kualitas Laporan Keuangan	0,828	0,820

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Dari tabel 1 menunjukkan nilai adjusted *R-square* untuk variabel kualitas laporan keuangan diperoleh nilai sebesar 0.820 atau sebesar 82% yang berarti variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh kuat oleh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi atau masih ada 18% variabel lain yang belum menjadi pengamatan dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis Berpengaruh Langsung

Tabel 6 Pengaruh Langsung antara Variabel

Pengaruh	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>
Penerapana Standar Akuntansi -> Kualitas Laporan Keuangan	0,422	0,441	0,158	2,678	0,008
Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan	0,243	0,237	0,091	2,673	0,008

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

1) Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagaimana dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan nilai *original sample (O)* yang merupakan koefisien jalur sebesar 0.422 dengan nilai *T statistic* sebesar 2.673. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1.960). Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2) Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagaimana dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan *original sample (O)* yang merupakan koefisien jalur sebesar 0.243 dengan nilai *T statistic* sebesar 2.673. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel (1.960). Sehingga dapat diartikan bahwa hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengujian Hipotesis Berpengaruh Tidak Langsung

Hipotesis berpengaruh tidak langsung, dihipotesiskan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan dan variabel Sistem Pengendalian Internal memoderasi pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Berikut adalah tabel pengaruh tidak langsung antar variabel.

Tabel 7 Pengaruh Tidak Langsung antar Variabel

Pengaruh	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics	P Values
Sistem Pengendalian Internal ->Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	-0,240	-0,246	0,130	1,845	0,066
Sistem Pengendalian Internal ->Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,231	0,235	0,121	1,908	0,057

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

1) Pengujian Hipotesis 3 : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi sebagaimana terlihat pada tabel 4.9 menunjukkan *original sample* (O) yang merupakan koefisien jalur sebesar -0.240 dengan nilai *T statistic* sebesar 1.845. nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1.960). Sehingga dapat diartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan

2) Pengujian Hipotesis 4 : Pengaruh pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel memoderasi sebagaimana dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan *original sample* (O) yang merupakan koefisien jalur sebesar 0.231 dengan nilai *T statistic* sebesar 1.908. nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel (1.960) sehingga dapat diartikan bahwa Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan

Interpretasi Hasil

1) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian dimungkinkan bahwa implementasi prinsip-prinsip penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di BPKAD Kota Bekasi sudah berjalan memadai, sehingga hal ini dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Astika *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Maka hasil dari penelitian ini sangat didukung kebenarannya karena adanya hasil penelitian sebelumnya. Penerapan standar akuntansi pemerintah dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah daerah ataupun pusat sangat wajib diterapkan dalam

penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang berguna dan berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan

2) Pengaruh Langsung Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian dimungkinkan bahwa implementasi penggunaan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di BPKAD Kota Bekasi sudah berjalan memadai, sehingga hal ini dapat membantu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ni Putu *et al.*, (2017) yang menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi terdapat pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Maka hasil dari penelitian ini sangat didukung kebenarannya karena adanya hasil penelitian sebelumnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah daerah ataupun pusat sangat wajib dan perlu diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dimana sangat membantu pengelolaan laporan keuangan secara efektif dan efisien serta menjamin keterbentukan kualitas laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

3) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi.

Hasil penelitian adalah Budaya Organisasi memoderasi Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian adanya Sistem Pengendalian Internal memperlemah pelaksanaan atau pengimplementasian prinsip-prinsip Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Galuh Dahana (2020) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan. Maka hasil dari penelitian ini tidak mendukung karena adanya perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya. Hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. dikarenakan sistem pengendalian internal merupakan suatu proses tindakan yang terintegrasi pada kegiatan yang di jalankan oleh pimpinan untuk mber daya manusia suatu organisasi demi mencapai tujuan organisasi. Ketika pimpinan suatu organisasi bukan seseorang yang berkompeten dalam menjalankan sistem pengendalian intern maka sistem pengendalian interntidak akan jalan mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya manusia sebagaimana mestinya.

4) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis maka yang didapat dari hasil penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian adanya Sistem Pengendalian Internal memperlemah pelaksanaan atau penggunaan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung terciptanya Kualitas Laporan Keuangan yang berkualitas. Hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hardyansyah (2016) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas Laporan Keuangan. Maka hasil dari penelitian ini tidak mendukung karena adanya perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

Beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Untuk pengujian moderasi maka hasil penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Internal tidak memoderasi pengaruh terhadap hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal tidak memoderasi pengaruh terhadap hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Keterbatasan dan saran dalam penelitian yaitu ini objek penelitian pada BPKAD Kota Bekasi sebagai objek tunggal, penelitian berikutnya dapat menggunakan beberapa objek penelitian atau melakukan perbandingan kinerja antar BPKAD di beberapa kota. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam durasi penyebaran kuesioner yang relatif singkat sehingga penelitian berikutnya dapat memperpanjang durasi penyebaran kuesioner sehingga terjadi peningkatan jumlah sampel untuk hasil yang lebih representatif.

Referensi

- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar (S. Saat (ed.); Ke-3). PT. Gelora Aksara Pratama.
- Chang, L. (1994). A Psychometric Evaluation of 4-Point and Likert-Type Scales in Relation to Reliability and Validity. 18, 205–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/014662169401800302>
- Chomeya, R. (2010). Quality of Psychology Test Between Likert Scale 5 and 6 Points. *Journal of Social Sciences*, 6(3), 399–403.
- Dahana, G. S. M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi (Studi Persepsi Pegawai Pengelola Keuangan Pada OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret*, 20(1), 10–55.
- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,

- Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(2), 196–209.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling: Rigorous Applications, Better Results and Higher Acceptance. *Long Range Planning*, 46(1–2), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah (E. S. Suharsi (ed.); Ke-2). Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2015). Teori Akuntansi. PT. Rajagrafindo Persada.
- Hardyansyah. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada SKPD Kabupaten Polewali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1–24.
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Akuntansi Pemerintah. IN MEDIA.
- Hery. (2014). Akuntansi Dasar 1&2 (Ke-1). PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (revisi 2009) (Revisi, Vol. 01, Issue 01). Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikriyati, T., & Aprilia, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mahayani, N. P. L., Sulindawati, N. L. G. E., & Dewi, P. E. D. M. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi (Ke-4). Salemba Empat.
- Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007>
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global*, 10(1), 55–

62.

- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., C. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ke-22)*. CV. ALFABETA.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*, 24, 16–31.
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189–198. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.15159>
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>
- Sari, N. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bu. 3(1), 294–308.